

Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Agustiyana Lailatus Sholikhah¹

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
(Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116)
agustiyanalaila18@gmail.com

Nuwun Priyono²

Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
(Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116)
nuwunpriyono@untidar.ac.id

Abstract

This study aims to determine the magnitude of variance ratio analysis and regional spending compatibility ratio analysis in Jepara Regency Regional Government for the period 2017 to 2020. In addition, we also want to know the level of regional spending efficiency in Jepara Regency Regional Government. The research method used is quantitative descriptive by using the analysis of variance ratio analysis, compatibility ratio analysis, and spending efficiency ratio analysis. The results show that from 2017 to 2020 Jepara Regency Regional Government falls into the category of favorable variance performance because the realization of expenditure does not exceed the total budgeted, almost 70% of total regional expenditure is used for operating expenditure, while the proportion of capital expenditure is far from operating expenditure, and the performance of the Jepara Regency Regional Government are included in the efficient category. This shows that the Regional Government of Jepara regency has succeeded in spending efficiency. The Regional Finance and Assets Management Agency should pay more attention to the situation and conditions in the hope that the budget can be realized well.

Keywords: *Regional Expenditure, Variance Ratio, Harmony Ratio, and Efficiency Ratio*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya analisis rasio varians dan analisis rasio keserasian belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2017 hingga 2020. Selain itu, juga ingin mengetahui tingkat efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis analisis rasio varians, analisis rasio keserasian, dan analisis rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara masuk dalam kategori kinerja selisih yang disukai (*favourable variance*) karena realisasi belanja tidak melebihi total yang dianggarkan, hampir 70% total belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, sementara proporsi belanja modal jauh dari belanja operasi, dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara termasuk dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Jepara telah berhasil melakukan efisiensi belanja. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara sebaiknya lebih memperhatikan situasi dan kondisi dengan harapan anggaran tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Rasio Varians, Rasio Keserasian, dan Rasio Efisiensi

Pendahuluan

Lahirnya akuntabilitas badan publik seperti kantor pemerintahan, merupakan bentuk komitmen suatu kantor pemerintahan dalam rangka memikul tanggung jawab atas sebuah keberhasilan maupun kegagalan dari dilaksanakannya misi organisasi tersebut. Hal ini adalah dampak adanya perubahan pada aparatur pemerintah. Salah satu ilustrasi dari adanya perubahan pemerintah dalam mendukung pembangunan dari masing-masing wilayah atau daerah di Indonesia adalah otonomi daerah (Adisasmita, 2011).

Penerapan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang selanjutnya diperbarui lebih lanjut menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditegaskan dengan memberdayakan daerahnya melalui wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya serta kebutuhan rakyatnya. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan

daerahnya melalui wewenang yang dimilikinya dalam rangka memungut pendapatan secara mandiri serta berperan distributif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seperti daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, Kabupaten Jepara termasuk salah satu kabupaten yang berpartisipasi dalam melaksanakan otonomi daerah dengan lokasi daerahnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, Kabupaten Jepara secara mandiri melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Suatu daerah dapat dinilai berdasarkan keberhasilannya dalam melakukan kinerja pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kinerja atas pencapaian pelaksanaan program perwujudan visi dan misi pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menjadi objek penelitian yang cukup menarik, karena Kabupaten Jepara senantiasa melakukan peningkatan terhadap aparatur daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2017-2020 serta sumbangan PAD yang nominalnya cenderung meningkat, namun untuk angka

pertumbuhan persentasenya cenderung menurun. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jepara juga menetapkan capaian target untuk belanja, baik yang berkaitan dengan kabupaten ataupun proyek dan aktivitas dalam rangka membangun tanggungjawab rencana belanja dan menjelaskan efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran, belanja, serta pertumbuhan pengeluaran dibandingkan dengan hasil yang dicapai selama periode tertentu dibandingkan periode berikutnya.

Pemerintah daerah menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya dan APBD ini merupakan suatu instrumen yang utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah (Fathiyah et al., 2021). Pembiayaan pembangunan daerah merupakan cerminan dari alokasi besarnya pendapatan dan belanja daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang berbanding lurus, yaitu apabila alokasi pendapatan daerah meningkat maka akan memiliki dampak yang sama terhadap porsi pembiayaan pada pembangunan dalam belanja daerah yang juga akan semakin meningkat sehingga kebutuhan pembangunan bisa terpenuhi tanpa hambatan. Adanya pertimbangan bahwa lahirnya desentralisasi fiskal secara signifikan akan membatasi keuangan pemerintah daerah dan memungkinkan berkurangnya ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat, sehingga adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan yang diperuntukkan dalam rangka belanja daerah wajib dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Belanja daerah diartikan sebagai pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik yang dikelola oleh kabupaten/kota atau provinsi yang terdiri atas urusan wajib dan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang (Sasana, 2011). Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat ke dalam garis-garis pengeluaran yang diperlukan oleh rakyat akan menekan munculnya perkembangan yang positif dalam upaya

kenaikan kesejahteraan rakyatnya. Stewardship Theory mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, mempunyai integritas serta kejujuran kepada pihak lain. Hal ini memunculkan suatu indikasi bahwa Pemerintah Daerah memikul pertanggungjawaban yang besar dalam memenuhi fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan fiskal yang dipercayakan oleh pemerintah pusat, sehingga pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat tercapai dan terjadi (Ara, 2016).

Agar mampu secara baik, lancar, dan efisien dalam mengelola belanja daerah maka pemerintah daerah perlu mengukur kinerja fiskalnya untuk mengetahui seberapa ekonomis, efisien, dan efektif mereka dapat membelanjakan uang publiknya. Pemerintah daerah harus mampu mengontrol pengeluaran daerah, meningkatkan efisiensi pengeluaran, dan menghemat anggaran. Pentingnya mengukur kinerja fiskal berguna untuk mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Poyoh et al., 2017). Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam perwujudan akuntabilitas dan transparansi belanja daerah, juga dalam urusan mengatur dan penyampaian laporan keuangan yang penyusunannya atas dasar standar akuntansi pemerintahan dan mencapai prinsip ketepatan waktu (Sari et al., 2018).

Analisis belanja daerah diperlukan dalam rangka memberikan penilaian pada pemerintah daerah, apakah APBD telah digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*) (Kainde, 2013). Adanya Standar Analisa Belanja (SAB) dapat digunakan sebagai pedoman untuk menganalisa kewajaran pengeluaran masing-masing proyek/aktivitas yang dilakukan oleh suatu unit kerja pada 1 tahun anggaran (Adisasmita, 2011).

Penelitian tentang analisis belanja daerah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun masih terdapat beberapa perbedaan hasil dalam penelitiannya.

Fathiyah et al., (2021) melakukan penelitian mengenai analisis belanja daerah dengan metode analisis rasio varians, rasio keserasian, dan rasio efisiensi belanja menunjukkan hasil bahwa berdasarkan rasio varians menunjukkan adanya realisasi dengan kategori *favourable variance* atau realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan, sementara selama lima tahun terakhir rasio untuk keserasian belanja berdasarkan rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan persentase alokasi belanja operasi yang lebih besar dari persentase belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi masuk dalam kategori kinerjanya efisien. Penelitian tersebut juga diperkuat oleh Saputra et al., (2018) yang menyatakan bahwa varian belanja masuk dalam kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih banyak digunakan untuk belanja operasional, dan rasio efisiensi masuk dalam kategori efisien. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhaedi, (2019) yang menyatakan bahwa varians belanja masuk dalam kategori *favourable varians*, sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, dan pengelolaan anggaran masuk dalam kategori kurang efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya ketidaksamaan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui besarnya analisis varians dan analisis keserasian belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk tahun anggaran 2017-2020. Selain itu, juga ingin mengetahui tingkat efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten Jepara.

Kerangka Teoritis

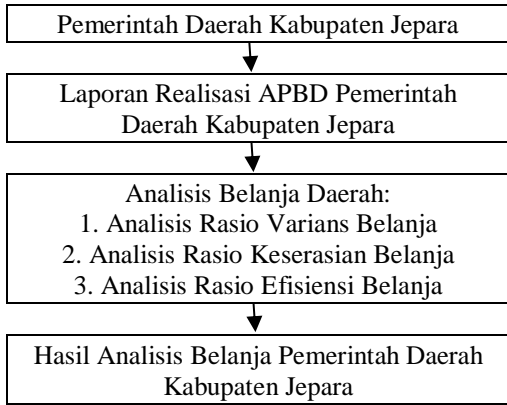
Kerangka Koseptual

Kinerja keuangan diartikan sebagai suatu ilustrasi atas kondisi keuangan sebuah instansi pada periode tertentu. Apabila dikaitkan dengan suatu instansi pemerintah daerah, kinerja keuangan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dalam penggunaan anggaran yang menyatakan efisiensi sebuah daerah dalam hal pemberian pelayanan kepada publik. Pengukuran kinerja dilakukan atas tujuan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan pada masa sebelumnya serta menyediakan metode yang tepat secara berkelanjutan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan.

Penilaian kinerja keuangan daerah dapat menggunakan salah satu alat yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah, termasuk belanja daerah. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan dalam melakukan evaluasi apakah pemerintah daerah telah secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam menggunakan APBD. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan analisis belanja daerah berupa analisis rasio varians belanja, analisis rasio keserasian belanja, dan analisis rasio efisiensi belanja.

Atas hasil analisis belanja daerah, maka pada analisis rasio varians belanja menyatakan bahwa kinerja belanja pemerintah daerah akan dinilai baik jika realisasi belanja tidak melebihi dari anggarannya. Analisis rasio keserasian belanja menuntut pemerintah daerah dalam membuat harmonisasi belanja, sementara dalam analisis rasio efisiensi belanja, pemerintah daerah akan dinilai telah melakukan efisiensi anggaran apabila rasio efisiensinya kurang dari 100% dan apabila terjadi sebaliknya maka dikatakan sebagai pemborosan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka berikut kerangka konseptual atas penelitian ini:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Tinjauan Pustaka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran diartikan sebagai suatu rencana organisasi jangka pendek yang menerjemahkan program-program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkrit (Dien et al., 2015). APBD merupakan sebuah rencana keuangan dengan periode tahunan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan menggunakan peraturan daerah (Halim & Kusufi, 2014). Sementara, menurut Hasanah & Anitasari (2020) APBD merupakan bentuk sebuah pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun ditetapkan menggunakan peraturan daerah. APBD memiliki unsur yang meliputi: 1. Pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah 2. Anggaran belanja yang dirinci atas dasar organisasi, fungsi, dan jenis belanja. 3. Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah (Purwaningsih & Priyono, 2021).

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan sebuah beban yang dikeluarkan oleh daerah untuk dialokasikan berdasarkan konsep keadilan dan pemerataan dengan tujuan dapat

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi (Lontaan & Pangerapan, 2016). Sementara menurut Halim & Kusufi, (2014) belanja daerah adalah suatu kewajiban bagi pemerintah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer, diartikan sebagai sebuah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim & Kusufi, (2014), kinerja merupakan hasil pencapaian dengan kuantitas dan kualitas yang terukur atas sebuah kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan anggaran. Kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan yang mengukur pencapaian prestasi perusahaan serta menggunakan modal dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan perusahaan (Saputra et al., 2016). Sedangkan kinerja keuangan daerah adalah sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan daerah (Sartika, 2019). Salah satu alat yang dapat digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah, termasuk belanja daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola belanja

dengan baik agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Analisis Belanja Daerah

Pentingnya melakukan analisis belanja daerah dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan APBD apakah telah digunakan oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Mahmudi menyatakan dalam Fathiyah et al., (2021), bahwa tujuan dilakukannya analisis belanja daerah berguna untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran, maka dapat dilakukan analisis belanja berupa analisis varians belanja, rasio keserasian, dan rasio efisiensi belanja.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan unsur-unsur dengan karakteristik tertentu yang bisa digunakan dalam menarik kesimpulan (Chandrarin, 2018). Pada penelitian ini populasinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. LKPD ini terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan, diantaranya ada Neraca, laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sampel merupakan kumpulan dari subjek yang digunakan untuk mewakili populasi (Chandrarin, 2018). Pada penelitian ini sampel yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017-2020. LRA merupakan suatu laporan yang menyajikan serta menginformasikan data terkait realisasi anggaran, belanja,

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode (Abdal et al., 2018). Pemilihan sampel tersebut atas dasar kriteria tertentu, yaitu berdasarkan tujuan dari penelitian ini dengan menganalisis kinerja belanja daerah menggunakan data anggaran dan realisasi belanja yang tertuang dalam LRA Pemerintah Daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*). Data runtun waktu diartikan sebagai jenis data yang sistem pengambilan nilainya dilakukan selama periode yang ditentukan secara berurutan (Chandrarin, 2018). Pada penelitian ini runtun waktu ditetapkan atas dasar periode tahun, yaitu 2017 hingga 2020.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder berarti data yang diperoleh dari pihak atau lembaga pengguna atau yang telah mempublikasikan. Penelitian ini memperoleh data dari website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa angka-angka yang memiliki asal dari masing-masing pengukuran variabel. Data ini diperoleh dari Laporan Realisasi (LRA) dengan menggunakan angka-angkanya sebagai unsur yang akan dimasukkan pada rumus analisis belanja daerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan desain deskriptif kuantitatif. Sehingga peneliti hanya melakukan analisis yang sifatnya menjelaskan fenomena yang ada tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Analisis Rasio Varians Belanja

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran (Kawatu, 2019).

Hasil dari analisis ini dapat ditampilkan dalam dua bentuk, baik nilai nominalnya maupun besarnya persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi 2 bentuk, yaitu 1) *Favourable Variance* (Selisih Disukai) terjadi apabila realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya; dan 2) *Unfavourable Variance* (Selisih Tidak Disukai) terjadi apabila realisasi belanjanya lebih besar dari anggarannya. Informasi selisih anggaran ini sangat berguna bagi pengguna laporan saat menganalisis indikator pendapatan (Saputra et al., 2018). Berikut rumus dalam menghitung rasio varians belanja:

Varians Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

Analisis Rasio Keserasian Belanja

Analisis ini berguna untuk memahami antar belanja yang mengalami keseimbangan. Rasio keserasian memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah secara optimal mampu memberikan prioritas alokasi dana pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Hal ini berarti adanya hubungan berbanding terbalik antara biaya operasional dan biaya modal. Jadi, apabila persentase dana yang digunakan untuk Biaya Operasional semakin tinggi, berarti persentase Biaya Modal yang digunakan sebagai wujud persediaan aset ekonomi dan infrastruktur kepada masyarakat akan cenderung mengecil (Fathah, 2017). Fungsi anggaran akan berjalan dengan optimal jika pemerintah daerah berhasil membuat harmonisasi belanja sesuai fungsinya sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Pada penelitian ini akan menghitung rasio belanja operasi terhadap total belanja serta rasio belanja modal terhadap total belanja.

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini membandingkan total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio belanja operasi bersifat informatif kepada pengguna laporan terkait porsi belanja

daerah yang diperuntukkan pada bagian-bagian belanja yang didistribusikan untuk belanja operasional. Belanja operasi sifatnya adalah jangka pendek dan pada kasus tertentu memiliki sifat teratur atau berulang-ulang karena memiliki manfaat yang habis dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Sehingga pada beberapa kasus dapat berjalan secara kontinu dan konsisten karena bersifat jangka pendek (Farida & Nugraha, 2019). Secara umum, persentase antara 60-90% untuk belanja operasional mendominasi total belanja daerah. Berikut rumus dalam menghitung rasio belanja operasi terhadap total belanja:

Realisasi Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini membandingkan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja informatif berupa porsi belanja daerah yang diperuntukkan dalam berinvestasi dengan wujud belanja modal pada setiap tahun anggaran. Biaya modal ini memiliki sifat tidak rutin dan bermanfaat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Umumnya belanja modal menyumbang berkisar 5-20% terhadap total belanja (Mahmudi, 2016). Berikut rumus dalam menghitung rasio belanja modal terhadap total belanja:

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini adalah hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran (Kawatu, 2019). Tingkat penghematan anggaran pemerintah dapat diukur menggunakan rasio ini. Angka-angka yang diperoleh dari rasio memiliki sifat relatif tanpa adanya standar yang dianggap cocok atas rasio ini. Apabila hasil dari persentasenya kurang dari 100%, maka pemerintah daerah telah dianggap berhasil

melaksanakan efisiensi anggaran dan sebaliknya akan dianggap terjadi pemborosan anggaran apabila hasil persentasenya lebih dari 100%. Berikut rumus dalam menghitung rasio efisiensi belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Rasio Varians Belanja

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jepara tahun 2017-2020, maka dapat dilakukan perhitungan rasio varians belanja sebagai berikut:

- 1) Rasio Varians Belanja Tahun 2017

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}}{\text{Anggaran Belanja Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.215.459.688.063}{2.363.608.647.000} \times 100\%$$

$$= 93,73\%$$
- 2) Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2018

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}}{\text{Anggaran Belanja Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.300.574.121.504}{2.410.277.498.000} \times 100\%$$

$$= 95,44\%$$
- 3) Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2019

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}}{\text{Anggaran Belanja Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.337.605.986.009}{2.522.601.340.000} \times 100\%$$

$$= 92,66\%$$
- 4) Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2020

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}}{\text{Anggaran Belanja Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.268.045.725.410}{2.513.540.360.992} \times 100\%$$

$$= 90,23\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio varians di atas, berikut disajikan ringkasan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun 2017-2020:

Tabel 1
Rasio Varians Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 2017-2020

Tahun	Target (T)	Realisasi (T)	%	Kinerja
2017	2,363	2,215	93,7	FV
2018	2,410	2,300	95,4	FV
2019	2,522	2,337	92,6	FV
2020	2,513	2,268	90,2	FV
Rata-Rata	2,452	2,280	92,9	FV

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1 tampak bahwa terdapat selisih antara target dan realisasi yang ada. Diketahui bahwa realisasi belanja jauh lebih kecil jika dibandingkan dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, selama empat tahun terakhir sejak 2017-2020 rata-rata rasio varians belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sebesar 92,9% dan masuk dalam kategori Selisih Disukai (*Favourable Variance*) dikarenakan realisasi belanja tidak melebihi total yang dianggarkan. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah melakukan penghematan ditinjau dari persentasenya yang tidak terlalu besar tetapi apabila ditinjau dari sisi jumlah nominalnya adalah cukup signifikan. Jadi, pada hakikatnya kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Jepara dapat dikatakan baik karena terjadinya penghematan anggaran.

Analisis Rasio Keserasian Belanja Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jepara tahun 2017-2020, maka dapat dilakukan perhitungan rasio belanja operasional terhadap total belanja, sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Operasi terhadap Total Belanja 2017

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$= \frac{1.494.716.108.018,00}{2.215.490.310.57300,}$$

$$= 67,46\%$$

2) Realisasi Belanja Operasi terhadap Total Belanja 2018

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{1.555.841.847.286,00}{2.300.574.121.504,00} = 67,62\%$$

3) Realisasi Belanja Operasi terhadap Total Belanja 2019

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{1.599.743.027.498,00}{2.337.605.986.009,00} = 68,43\%$$

4) Realisasi Belanja Operasi terhadap Total Belanja 2020

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Operasi}} = \frac{1.620.414.249.411,00}{2.268.045.725.410,00} = 71,44\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja di atas, berikut disajikan ringkasan untuk mengetahui alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun 2017-2020:

Tabel 2
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 2017-2020

Tahun	Belanja Operasi (T)	Total Belanja (T)	%
2017	1,494	2,215	67,4
2018	1,555	2,300	67,6
2019	1,599	2,337	68,4
2020	1,620	2,268	71,4
Rata-rata	1,567	2,280	68,7

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2 tampak bahwa rata-rata belanja operasi terhadap total belanja dalam periode empat tahun terakhir sejak 2017-2020 adalah sebesar 68,7%. Hal ini membuktikan bahwa

hampir 70% belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jepara tahun 2017-2020, maka dapat dilakukan perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja, sebagai berikut:

1) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2017

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{404.345.727.549,00}{2.215.490.310.573,00} = 18,25\%$$

2) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2018

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{397.783.041.502,00}{2.300.574.121.504,00} = 17,29\%$$

3) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2019

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{325.214.472.023,00}{2.337.605.986.009,00} = 13,91\%$$

4) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2020

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{266.275.554.085,00}{2.268.045.725.410,00} = 11,74\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja di atas, berikut disajikan ringkasan untuk mengetahui alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun 2017-2020:

Tabel 3
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 2017-2020

Tahun	Belanja Modal (M)	Total Belanja (T)	%
2017	4,043	2,215	18,2
2018	3,977	2,300	17,2
2019	3,252	2,337	13,9
2020	2,662	2,268	11,7
Rata-rata	3,484	2,280	15,2

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan olahan data pada tabel 3 tampak bahwa selama periode empat tahun terakhir sejak 2017-2020 rata-rata alokasi belanja modal terhadap total belanja adalah sebesar 15,2%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja modal jauh dibawah proporsi belanja operasi.

Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jepara tahun 2017-2020, maka dapat dilakukan perhitungan rasio efisiensi belanja sebagai berikut:

1) Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2017

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.215.459.688.063}{2.363.608.647.000} \times 100\%$$

$$= 93,73\%$$

2) Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2018

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.300.574.121.504}{2.410.277.498.000} \times 100\%$$

$$= 95,44\%$$

3) Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2019

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.337.605.986.009}{2.522.601.340.000} \times 100\%$$

$$= 92,66\%$$

4) Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2020

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.268.045.725.410}{2.513.540.360.992} \times 100\%$$

$$= 90,23\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di atas, berikut disajikan ringkasan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun 2017-2020:

Tabel 4
Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 2017-2020

Tahun	Target (T)	Realisasi (T)	%	Kinerja
2017	2,363	2,215	93,7	Efisien
2018	2,410	2,300	95,4	Efisien
2019	2,522	2,337	92,6	Efisien
2020	2,513	2,268	90,2	Efisien
Rata-Rata	2,452	2,280	92,9	Efisien

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan olahan data pada tabel 4 tampak bahwa sejak tahun 2017-2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara mengalami efisiensi penggunaan anggaran. Persentase efisiensi penggunaan anggaran. Persentase 93,7% diperoleh dari hasil perbandingan total realisasi belanja untuk tahun 2017 dengan total anggaran belanja yang dianggarkan dalam APBD. Persentase sebesar 95,4% diperoleh pada tahun 2018. Ini merupakan persentase paling tinggi diantara 2017-2020. Persentase sebesar 92,6% diperoleh pada tahun 2019 dengan membandingkan total realiasi belanja dengan total anggaran belanja yang telah dianggarkan dalam APBD. Dan hanya sebesar 90,2% perbandingan antara total realisasi belanja dengan total anggaran belanja yang dianggarkan dalam APBD terjadi pada tahun 2020. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode 4 tahun terakhir dari 2017 hingga 2020 rata-rata realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sebesar 92,2% dengan kategori hasil kinerja yang efisien. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah

Kabupaten Jepara telah mampu melakukan efisiensi dalam belanja.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, diperoleh kesimpulan yang pertama yaitu analisis rasio varians belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara selama tahun 2017-2020 memiliki rata-rata sebesar 92,9% dengan kategori kinerja selisih yang disukai (*favourable variance*) karena realisasi belanja tidak melebihi total anggaran. Kedua adalah analisis rasio keserasian belanja yang dihitung dari rasio belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan hasil selama tahun 2017-2020 memiliki rata-rata sebesar 68,7%, artinya hampir 70% total belanja daerah digunakan untuk belanja operasional. Sedangkan persentase sebesar 15,2% merupakan hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja, artinya proporsi belanja modal jauh dibawah belanja operasi. Ketiga adalah analisis rasio efisiensi belanja selama tahun 2017-2020 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 92,9% dengan kategori kinerja efisien. Hal ini menunjukkan pelaksanaan efisiensi belanja pada Pemerintah Daerah kabupaten Jepara dinyatakan berhasil.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain peneliti belum menggunakan data primer berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan, pengolahan datanya hanya menggunakan analisis rasio varians belanja, analisis keserasian belanja, dan analisis efisiensi belanja. Selain itu dalam penelitian ini hanya menggunakan periode yang singkat, yaitu selama 4 (empat) tahun dari 2017-2020.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terutama Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara agar dapat menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan kondisi dengan harapan anggaran tersebut dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, sebaiknya pemerintah daerah tetap meningkatkan realisasi belanja dalam hal belanja modal dan mengefisienkan belanja dalam hal belanja operasional karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase belanja modal jauh di bawah belanja operasi.

Daftar Pustaka

- Abdal, A., Herabudin, H., & Saodah, S. (2018). Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Garut. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(2), 87–95. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i2.7628>
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Ara, S. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten Di Pulau Sumba. *JAFFA*, 04(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1878>
- Chandrarini, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 534–541.
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>

- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Fathiyah, Sumakna, A., Majid, H., & Masnun. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 6(April), 117–122. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.236>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Hasanah, M., & Anitasari, M. (2020). Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10905>
- Kainde, C. (2013). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 393–400. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1838>
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Lontaan, I. C., & Pangerapan, S. (2016). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA*, 4(1), 898–906. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11820>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP AMP YPKN.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 5(2), 745–752. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15958>
- Purwaningsih, E., & Priyono, N. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015-2019. *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 7(01), 24–38.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2014. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1), 1–11.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrannatahun. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136–145. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/bjm.v4i2.22006>
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Jurnal FEB UMMUL*, 15(1), 38–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 46–58. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/529> sasana
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78.